



Menelusuri Dialog Agama dalam Sejarah

Muhamad Ubaydillah^{1*}, Amin Nurdin²

¹⁻²Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: muhamadubaydillah26@gmail.com¹, amin.nurdin@uinjkt.ac.id²

*Penulis Korespondensi: muhamadubaydillah26@gmail.com

Abstract. *This study examines the dynamics of interreligious dialogue throughout history, both in the global sphere and within the Indonesian context. Interfaith dialogue is regarded as an essential means of fostering harmony, preventing conflict, and strengthening cross-faith understanding. The research traces the development of dialogue from the Second Vatican Council, the efforts of the Anglican Church, initiatives by international Islamic organizations, to Indonesia's own experiences, which have been marked by interreligious tensions, particularly during the New Order era and the Maluku conflicts. The findings indicate that interreligious dialogue takes place not only at the theological level but also in everyday life, social action, ethical engagement, and even within intra-faith contexts. Supporting factors include openness, commitment, and social concern, while obstacles encompass identity politics, discrimination, and issues of religious propagation. This study affirms that interreligious dialogue is not merely an ultimate goal but an essential religious way of life for the realization of genuine harmony and social justice in multicultural societies.*

Keywords: *History of Religion; Interreligious Dialogue; Multicultural Society; Religious Conflict; Religious Harmony.*

Abstrak. Penelitian ini membahas dinamika dialog antarumat beragama dalam lintasan sejarah, baik pada tataran global maupun konteks Indonesia. Dialog agama dipandang sebagai sarana penting untuk membangun kerukunan, mencegah konflik, serta memperkuat pemahaman lintas iman. Penelitian ini menelusuri perkembangan dialog mulai dari Konsili Vatikan II, upaya Gereja Anglikan, inisiatif organisasi Islam internasional, hingga pengalaman Indonesia yang diwarnai ketegangan antaragama, khususnya pada masa Orde Baru dan konflik Maluku. Hasil kajian menunjukkan bahwa dialog antaragama tidak hanya berlangsung pada level teologis, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, aksi sosial, pergumulan etis, hingga intraagama. Faktor pendukung dialog antara lain keterbukaan, komitmen, dan kepedulian sosial, sementara penghambatnya meliputi politik identitas, diskriminasi, serta isu penyebaran agama. Penelitian ini menegaskan bahwa dialog antarumat beragama bukan sekadar tujuan akhir, melainkan gaya hidup keagamaan yang esensial demi terciptanya kerukunan sejati dan keadilan sosial di tengah masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Dialog Antaragama; Kerukunan Umat Beragama; Konflik Agama; Masyarakat Multikultural; Sejarah Agama.

1. PENDAHULUAN

Dialog dipandang sebagai sesuatu yang esensial sekaligus menjadi pilihan terbaik dalam upaya menyelesaikan konflik antarumat beragama. Perselisihan yang muncul di antara penganut agama-agama berbeda harus segera diatasi agar tidak membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Seiring dengan perkembangan, dialog pada tingkat keagamaan menekankan perlunya setiap kelompok umat beragama memberikan penghormatan kepada pemeluk agama lain, sehingga mereka dapat memperdalam ajarannya masing-masing serta melaksanakan keyakinannya secara bebas, tanpa adanya prasangka, kecurigaan, atau saling mencurigai satu sama lain (Banawiratma, 2010). Dalam kondisi seperti ini, patut dipertanyakan kembali apakah dialog-dialog yang membahas relasi antaragama masih relevan untuk terus dilanjutkan.

Perlu juga direnungkan apakah percakapan antarumat beragama benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki hubungan antaragama di Indonesia, khususnya antara komunitas gereja-gereja dengan umat Islam. Hal pertama yang perlu dicatat ialah bahwa praktik dialog antaragama sebenarnya merupakan fenomena yang relatif baru. Di Eropa sendiri, selama berabad-abad hampir tidak ditemukan adanya dialog antara berbagai denominasi gereja Kristen. Bahkan, apakah *religionsgespräch* pada abad ke-16, misalnya antara Gereja Katolik dengan sejumlah Gereja Protestan di Jerman, bisa benar-benar dipandang sebagai dialog dalam pengertian kita saat ini masih sangat meragukan. Barangkali, dialog ekumenis dalam arti yang sesungguhnya justru baru muncul dan berkembang secara lebih nyata pada abad modern ini (Schumann, 2003).

Menurut pandangan Mukti Ali, proses dialog antara umat Islam dengan umat Kristiani di Indonesia mulai terjalin pada tahun 1969. Setahun kemudian, tepatnya pada 1970, Dewan Gereja Sedunia menyelenggarakan sebuah sidang konsultatif mengenai dialog antarumat beriman yang dilaksanakan di Ajaltoun, Libanon. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia diwakili oleh A. Mukti Ali yang memaparkan makalah berjudul *Dialogue between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems*. Dalam tulisan itu, ia menguraikan pandangannya tentang perkembangan, dinamika, serta berbagai persoalan yang muncul dalam praktik dialog antaragama di Indonesia.

“Dialog antara Islam dan Kristen baru dimulai pada 1969. Inisiatif tersebut datang dari saya sendiri, dan setelah mendiskusikan hal tersebut dengan teman-teman Kristiani saya maka dialog tersebut berlangsung. Pada November 1969 pertemuan pertama dilaksanakan di sebuah Kolese Katolik, dihadiri oleh seorang Muslim (saya sendiri), dua orang Katolik dan tiga orang Protestan. Pada pertemuan kedua Bulan Desember, saya menyampaikan pemikiran yang sebenarnya bukan merupakan makalah ilmiah—mengenai opini saya tentang (sikap) Vatikan terhadap umat non-Kristen, misalnya Yahudi, Muslim, dan lain-lainnya, tentang posisi Paus, dan sebagainya.”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder yang mencakup buku-buku, artikel jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen historis yang memiliki relevansi dengan kajian dialog antarumat beragama.

Analisis data dilakukan dengan menelaah perkembangan sejarah dialog antaragama di berbagai konteks, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik dialog tersebut. Proses analisis menggunakan kerangka historis-komparatif untuk melihat dinamika dialog pada level global (Eropa, dunia Islam, Vatikan) dan konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, yakni mengungkap makna penting dialog antaragama bagi kerukunan sosial dan kehidupan beragama di era kontemporer.

3. ISU DAN PEMBAHASAN

Dialog Antar Umat Beragama

Dialog antara pemeluk agama yang berbeda sejatinya telah berlangsung sejak awal mereka saling berjumpa. Kehadiran suatu agama baru hampir selalu berinteraksi dengan iman atau keyakinan yang telah ada sebelumnya. Pertemuan ini membawa proses dialog ke berbagai tingkatan, termasuk pada ranah teologis. Namun, pembahasan dalam buku ini memfokuskan perhatian pada dialog yang berkembang sekitar tahun 1969, yaitu ketika dialog antarumat beragama mulai terstruktur dan bersifat lebih institusional. Periode akhir 1960-an hingga awal 1970-an menjadi fase penting bagi kalangan Kristiani dalam meninjau kembali hubungan mereka dengan pemeluk agama lain, khususnya setelah berakhirnya Konsili Vatikan II yang memberikan arah baru terhadap pendekatan dialog lintas iman.

Menurut Mukti Ali, dialog antar umat beragama yang dilakukan oleh para akademisi atau pengajar cenderung memberikan hasil yang lebih signifikan dibandingkan dialog yang dijalankan secara formal oleh kalangan politisi di tingkat pemerintahan. Kendati demikian, upaya untuk membangun dialog juga digerakkan oleh berbagai kelompok, baik yang berada dalam lingkup organisasi kemasyarakatan maupun institusi pemerintahan, yang turut berperan dalam memperkuat interaksi lintas iman tersebut.

Dialog antarumat beragama pada mulanya dipahami dari bawah, yakni dari perjumpaan langsung dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dalam pemahaman tersebut, dialog yang secara terbuka mengekspresikan isi iman dan ajaran agama tidak diabaikan, melainkan tetap dikembangkan sesuai dengan fungsi dan konteksnya. Bentuk dialog yang tumbuh dari bawah dapat dipetakan melalui tujuh tingkatan yang saling berkaitan satu sama lain. Tingkatan-tingkatan dialog itu dapat dipahami sebagai tahapan yang bersifat lentur, bahkan memungkinkan untuk dilompati.

Tingkatan atau dataran dialog itu juga bisa disebut sebagai momen-momen dialog, sebab aktivitas dan proses berdialog pada umumnya tidak selalu dimulai dari titik nol, melainkan dapat langsung dijalankan pada level tertentu yang sesuai dengan kondisi lingkungan serta situasi waktu yang ada. Dataran atau momen-momen dialog tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dialog pada tingkat pertama disebut dialog kehidupan, yakni interaksi yang terjadi di dalam komunitas kecil yang menjalani keseharian bersama. Anggota komunitas yang berbeda keyakinan saling mengenal dan bekerja sama menghadapi persoalan hidup, seperti kebutuhan air bersih, wabah penyakit, perumahan layak, pendidikan yang memadai, hingga lapangan pekerjaan. Mereka merasakan suka duka bersama, saling berbagi harapan dan kekhawatiran. Dalam suasana ini, tumbuh sikap saling menghargai, hidup rukun sebagai tetangga, dan membangun persahabatan. Dari pengalaman hidup bersama itulah lahir rasa kepedulian yang sama.

Pada tingkat kedua, komunitas lintas agama tersebut berusaha memahami realitas yang mereka hadapi serta menyusun pertimbangan etis. Mereka melakukan analisis sosial, mengkaji faktor penyebab situasi yang terjadi serta hubungan antarfaktor. Karena analisis sosial tidak terlepas dari nilai, maka komunitas perlu menyepakati nilai-nilai yang diperjuangkan bersama, seperti kedamaian, keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, dan perhatian pada anggota komunitas yang paling lemah. Dari analisis ini, lahir pilihan etis yang konkret. Proses ini kemudian dapat diperdalam lagi melalui refleksi yang didasarkan pada iman masing-masing anggota.

Pada tingkat ketiga, setiap anggota komunitas mulai menelusuri kembali tradisi iman masing-masing. Tahap ini penting karena keputusan etis seorang beriman tidak terlepas dari dasar dan kekuatan yang bersumber pada keyakinannya. Pada proses ini, seseorang dapat menegaskan pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai kehendak Tuhan atau hal-hal yang sesuai dengan Yang Mahatinggi. Terkadang, munculnya kepedulian baru dalam situasi yang berbeda mendorong perlunya penafsiran ulang terhadap tradisi, atau bahkan menggali kembali ajaran yang sempat terabaikan. Pada tahap ini pula, perhatian terhadap persoalan kemanusiaan yang sebelumnya dianalisis secara sosial dan etis, kini semakin dipahami secara mendalam sebagai bentuk kepedulian iman—saya menafsirkan realitas hidup dan panggilan moral ini melalui sudut pandang iman saya. Pada tingkat keempat, dialog diwujudkan melalui pertukaran pengalaman iman dalam komunitas lintas agama. Berdasarkan tradisi dan keyakinan masing-masing, para peserta saling berbagi pengalaman spiritual yang mereka miliki, sehingga tercipta proses saling memperkaya.

Dalam dialog ini, setiap orang beriman tetap berpegang teguh pada imannya, namun bersikap terbuka terhadap ajaran dan praktik religius yang berbeda (commitment and openness). Mereka bertukar cerita tentang pengalaman berdoa, meditasi, dan cara mendekatkan diri kepada Tuhan atau Sang Misteri Kehidupan. Melalui ruang ini, umat beragama menghindari sikap manipulatif dan agresif, sekaligus memperoleh wawasan berharga dari kekayaan tradisi agama lain.

Pada tingkatan kelima, dialog berlangsung dalam bentuk diskusi teologis antaragama. Para teolog atau pakar di berbagai bidang saling bertukar pandangan pada level akademis, membahas secara mendalam warisan keagamaan masing-masing, sambil tetap menghormati dan belajar dari pemahaman tradisi lain. Melalui interaksi ini, tercipta proses saling memperkaya dan membuka peluang untuk menafsirkan kembali serta mengarahkan ulang tradisi agar relevan dengan penghayatan iman di masa kini.

Pada tingkat keenam, dialog diwujudkan melalui aksi nyata. Dialog antaragama tidak cukup berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi harus membahas persoalan sosial dan mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat. Umat beragama tidak bisa melepaskan diri dari realitas bahwa mereka merupakan bagian dari struktur sosial dan politik. Harmoni antaragama yang tidak disertai kepedulian terhadap kondisi sosial dan politik berisiko melahirkan kerukunan semu yang tidak adil. Karena itu, dialog perlu melahirkan kerja sama lintas agama untuk memberdayakan masyarakat dengan menjunjung nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam situasi budaya, politik, dan ekonomi yang sering ambigu, keterlibatan ini harus mampu memberikan sikap tegas berupa afirmasi maupun koreksi demi terwujudnya transformasi sosial-politik. Dengan demikian, kelompok lintas iman berperan sebagai komunitas yang melayani kepentingan bersama, bersifat dialogis, dan membawa perubahan.

Dataran ketujuh disebut dialog intraagama, yaitu tahap ketika seseorang kembali merefleksikan imannya setelah melalui berbagai bentuk dialog lintas iman dan agama. Pada tahap ini, diperlukan sikap otokritik, yakni menilai ulang cara menghayati iman, yang bisa berupa penguatan sekaligus koreksi. Pengalaman dialog yang memperkaya dapat mendorong pembaruan diri sehingga kehidupan beragama menjadi lebih bermakna. Umat beragama diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik, baik secara individu maupun dalam komunitas—Muslim menjadi Muslim yang lebih baik, Kristiani menjadi Kristiani yang lebih baik, dan seterusnya. Sikap kritis terhadap diri sendiri sebenarnya dapat muncul sejak awal perjumpaan, tidak harus menunggu semua bentuk dialog dilalui.

Semakin dalam interaksi lintas agama terjadi, semakin besar pula peluang terjadinya perubahan dan pendalaman iman dalam kehidupan masing-masing. Tingkat pengalaman ini oleh John S. Dunne disebut dengan istilah “*passing over*” atau melintas, yakni sebuah proses berpindah dari satu kebudayaan menuju kebudayaan lain, dari suatu pola kehidupan ke pola kehidupan yang berbeda, serta dari satu tradisi agama ke tradisi agama yang lain. Namun, Dunne menegaskan bahwa tindakan melintas semata tidaklah mencukupi. Menurutnya, perjalanan tersebut harus dilengkapi dengan proses “kembali” (*coming back*), yaitu kembali ke budaya asal, cara hidup sendiri, dan agama yang diyakini, namun dengan cakrawala pemahaman yang lebih luas. Dalam perspektif Dunne, praktik melintas dan kembali ini wajib dijalani secara kreatif serta penuh simpati, sebab hanya dengan demikian perjalanan religius sekaligus spiritual mampu memberikan kekayaan pengalaman dan memperluas wawasan baru bagi individu yang melakukannya (Hidayat, dkk, 2001).

Dialog antarumat beragama dapat dipahami sebagai sarana atau tujuan antara, bukan sebagai tujuan akhir. Dialog dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar, yaitu terciptanya kehidupan bersama yang harmonis. Namun, cita-cita ini tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan aktif seluruh pihak. Dalam perspektif holistik, partisipasi dan kesadaran kolektif menjadi nilai yang sangat penting. Oleh karena itu, dialog harus dipandang sebagai pola hidup orang beriman, sebuah keharusan yang harus dijalankan apabila individu maupun komunitas ingin tetap setia pada panggilan kemanusiaan sekaligus kehendak ilahiah (Zaprul Khan, 2018).

Pentingnya Dialog Antar Umat Beragama

Dialog antarumat beragama dan upaya menciptakan kerukunan sejatinya merupakan dua bentuk komunikasi serta kerja sama lintas agama yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini karena salah satu unsur penting dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama adalah dengan menyelenggarakan dialog yang terbuka dan berkesinambungan antar pemeluk agama. Dalam semangat membangun suasana rukun tersebut, setiap penganut agama sudah semestinya mendalami ajaran agamanya secara lebih serius agar mampu memahami makna kerukunan tidak hanya secara praktis, melainkan juga dari sudut pandang doktrinal (Fatih, 2017). Pernyataan bahwa umat Kristiani dan umat Islam dapat hidup berdampingan secara rukun di Indonesia memang dapat dibuktikan di banyak daerah, bahkan sebagian besar pemeluk kedua agama tersebut menjalani kehidupan sehari-hari dalam suasana yang harmonis. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa hubungan antar komunitas agama di Indonesia benar-benar terbebas dari persoalan.

Faktanya, sejumlah masalah masih muncul dari waktu ke waktu dan sebagian di antaranya bahkan bereskalasi menjadi tindakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dalam dua *Annual Report on Religious Life in Indonesia* (2008 dan 2009) yang dipublikasikan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada. Walaupun konflik besar seperti yang pernah mengguncang Maluku dan Poso tidak lagi terulang dalam beberapa tahun terakhir, berbagai ketegangan antarumat beragama tetap berlangsung dan masih dapat dijumpai hingga sekarang.

Permasalahan terkait pendirian dan keberadaan rumah ibadah hingga kini masih menjadi salah satu hambatan serius dalam hubungan antarumat beragama, khususnya antara komunitas Kristiani dan Muslim. Setiap tahunnya, tercatat sejumlah kasus yang berhubungan dengan rumah ibadah, terutama gereja, dan tidak sedikit yang berujung pada tindakan kekerasan, seperti penutupan paksa bahkan pembongkaran bangunan. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan regulasi yang diperbarui pada tahun 2006 melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang bertujuan menjamin hak beribadah bagi seluruh warga negara. Namun, kenyataannya implementasi aturan ini di lapangan kerap menemui kendala, sehingga penegakan hukumnya sering kali tidak berjalan efektif.

Salah satu bentuk ketegangan lainnya adalah meningkatnya isu penyesatan yang dilontarkan terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang dalam sejumlah kasus bahkan berujung pada kekerasan. Berdasarkan Laporan Tahunan CRCS tahun 2009, tercatat sebanyak 25 kasus terkait tuduhan penyesatan, serta 11 kasus lainnya yang secara khusus menimpa pengikut Ahmadiyah. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada Juni 2008 terkait Ahmadiyah ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, kebijakan ini justru dinilai memberi legitimasi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat terhadap penganut Ahmadiyah. Kekerasan yang menimpa Ahmadiyah tersebut sebenarnya hanyalah kelanjutan dari berbagai bentuk kekerasan fisik yang telah mereka alami dalam beberapa tahun terakhir.

Selain berbagai ketegangan yang telah disebutkan, masih terdapat persoalan lain yang berkaitan dengan relasi antar dan intraumat beragama di Indonesia. Contohnya, kelompok-kelompok agama yang tidak termasuk dalam enam agama resmi yang diakui oleh negara, serta penganut aliran kepercayaan, masih kerap mengalami diskriminasi secara hukum.

Secara formal, mereka diperbolehkan hidup dan menjalankan keyakinannya di Indonesia, namun kenyataannya mereka tidak memperoleh tingkat perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada penganut enam agama resmi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa perlindungan lebih banyak dinikmati oleh kelompok arus utama dalam keenam agama tersebut, sedangkan kelompok-kelompok nonarus utama seringkali tidak mendapat perlindungan memadai. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah dalam Islam maupun Saksi Yehova dalam Kristen.

Melihat berbagai gejala umum yang ada, jelas bahwa upaya membangun hubungan harmonis antarumat beragama merupakan kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan kehidupan bersama di Indonesia. Terdapat banyak alasan yang menguatkan pentingnya dialog antaragama, salah satunya terkait tuntutan sosiologis. Tidak ada satu pun komunitas keagamaan yang mampu menyelesaikan persoalan kehidupan bersama secara sendirian, karena penyelesaian yang ideal memerlukan keterlibatan dan partisipasi seluas mungkin dari semua pihak. Dengan demikian, hanya ada dua pilihan yang tersedia: menciptakan harmoni sejati yang kokoh atau membiarkan keadaan berjalan dengan harmoni yang rapuh dan berpotensi menimbulkan masalah berkepanjangan.

Menelusuri Dialog Agama dalam Sejarah

Dalam tradisi Katolik, jejak awal pengembangan dialog antarumat beragama dapat ditelusuri sejak penunjukan Angelo Giuseppe Cardinal Roncalli sebagai Paus Yohanes XXIII pada tahun 1958. Sosok Paus ini mengejutkan dunia Katolik ketika mengusulkan penyelenggaraan Konsili Vatikan II bagi Gereja Katolik Roma pada tahun 1962. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan keyakinannya akan pentingnya Gereja Katolik untuk menjalin dialog, baik dengan gereja-gereja Kristen lainnya maupun dengan berbagai tradisi agama serta ideologi di luar Katolik. Meski sulit menentukan secara pasti peristiwa apa yang mendorong lahirnya pemikiran tersebut, salah satu faktor yang dapat menjadi penjelasan adalah meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara yang menganut beragam agama, sehingga jarak antarumat beragama semakin menyempit. Faktor lain yang juga berperan adalah semakin besarnya tantangan terhadap misi Katolik pada masa itu.

Paus Yohanes sendiri memimpin sesi pertama Konsili Vatikan II dan menetapkan arah dasar bagi lahirnya sebuah proyek dialog antaragama. Setelah wafatnya pada tahun 1963, gagasan tersebut kemudian diteruskan oleh Kardinal Montini yang dikenal sebagai Paus Paulus VI. Pada masa kepemimpinannya, diterbitkan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan dialog antaragama.

Lima teks utama yang lahir pada periode tersebut antara lain *Lumen Gentium* (Terang Bangsa-Bangsa), *Nostra Aetate* (Pada Zaman Kita), *Dei Verbum* (Tentang Wahyu Ilahi), *Gaudium et Spes* (Sukacita dan Harapan), *Ad Gentes* (Kepada Bangsa-Bangsa), serta *Dignitatis Humanae* (Martabat Pribadi Manusia). Beberapa di antara dokumen ini secara khusus menyinggung relasi umat Kristen dengan penganut agama lain, terutama dengan umat Islam. “Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, yang mengakui Sang Pencipta; di antara mereka terutama kaum Muslimin, yang menyatakan, bahwa mereka berpegang pada iman Abraham, dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maharahim, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat.” Selain itu, salah satu bagian dari *Nostra Aetate* menyatakan:

Gereja menyatakan penghargaan yang mendalam kepada umat Islam, yang menyembah Allah Yang Esa, Mahakuasa, penuh belas kasih, dan berdaulat atas seluruh ciptaan, Pencipta langit dan bumi yang telah menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Kaum Muslim berusaha untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Allah, termasuk terhadap ketetapan-ketetapan-Nya yang bersifat rahasia, sebagaimana dahulu Abraham—yang juga dihormati dalam Islam—telah dengan sukarela menyerahkan diri kepada-Nya. Meskipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, umat Islam menghormatinya sebagai Nabi, sekaligus memberikan penghormatan kepada Maria, Bunda-Nya yang perawan, bahkan memohon doa kepadanya pada kesempatan tertentu dengan penuh kekhidmatan. Selain itu, mereka menantikan hari pengadilan ketika Allah akan memberikan ganjaran kepada semua orang yang dibangkitkan. Karena itu, umat Islam sangat menjunjung tinggi kehidupan bermoral, mengabdikan diri kepada Allah melalui doa, sedekah, dan puasa.

Pada 19 Mei 1964, Vatikan secara resmi mendirikan sebuah sekretariat yang bertugas menjalin hubungan dengan agama-agama di luar Kristen. Sejak bulan Maret 1984, lembaga tersebut dikenal dengan sebutan PCID (Pontifical Council for Interreligious Dialogue). Setelah melalui fase kebingungan terkait arah dan sasaran kerja, khususnya mengenai esensi dari tujuan dialog, PCID akhirnya memusatkan perhatian pada relasi dengan komunitas Muslim. Upaya ini diwujudkan dengan pembentukan sebuah komisi khusus serta penerbitan pedoman berjudul “*Guidelines for a Dialogue between Muslims and Christians*”, yang dimaksudkan untuk menyediakan pijakan kuat dalam membangun dialog yang produktif dan harmonis antara penganut agama yang berbeda. Gereja Anglikan mulai membahas isu dialog antaragama secara resmi melalui Resolusi Konferensi Lambeth pada tahun 1968.

Konferensi berskala global ini diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali dan menjadi ajang pertemuan para uskup di bawah pimpinan Uskup Agung Canterbury di London, yang berfungsi sebagai ruang untuk berdoa bersama sekaligus saling berbagi informasi. Berbeda dengan konferensi-konferensi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada persoalan internal gereja, pertemuan tahun 1968 tersebut melahirkan dua keputusan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dialog antarumat beragama.

Di kalangan umat Islam, organisasi Mu'tamar al-Alam al-Islami atau World Muslim Congress resmi berdiri di kota Mekkah, Arab Saudi, pada tahun 1926. Meskipun misi utama organisasi ini pada awalnya lebih menitikberatkan pada persoalan sosial serta politik, dan tidak secara langsung berkaitan dengan upaya dialog antaragama, namun pada tahun 1969 Sekretaris Jenderal, Inamullah Khan, mulai mengemukakan pentingnya dialog antarumat beragama, terutama dalam menjalin hubungan dengan kalangan Kristen.

Salah satu lembaga Islam yang berperan aktif dalam bidang dialog antaragama adalah Rabitat al-'Alam al-Islami atau Muslim World League, yang berdiri di Mekkah pada tahun 1962 dengan keanggotaan sekitar 60 perwakilan dari berbagai negara di dunia. Organisasi ini lahir atas dasar pandangan bahwa banyak terjadi salah pengertian mengenai ajaran Islam, khususnya di kalangan non-Muslim. Oleh sebab itu, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang benar tentang Islam kepada pemeluk agama lain agar kesalahpahaman tersebut dapat diminimalisir. Untuk mewujudkan misi tersebut, program-program yang dijalankannya antara lain penerbitan dan penyebaran berbagai literatur serta buku-buku yang mengulas tentang Islam.

Jam'iyya al-Da'wa al-Islamiyya al-'Alamiyyah atau The World Islamic Call Society adalah salah satu organisasi penting yang turut mengangkat isu-isu terkait hubungan antara umat Islam dan Kristen. Lembaga ini resmi berdiri di Libya pada tahun 1972 dengan tujuan utama untuk melaksanakan berbagai program yang mencakup bidang keagamaan, kebudayaan, serta sektor sosial dan pendidikan (Banawiratma, dkk, 2010).

Dialog Antar Umat Beragama: Pengalaman Indonesia

Dialog dipandang sebagai sarana penting sekaligus alternatif ideal dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi antarumat beragama. Berbagai fenomena pertentangan antaragama memang harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Seiring perkembangannya, praktik dialog pada level keagamaan menuntut setiap komunitas beriman untuk saling menghargai pemeluk agama lain, memberikan ruang bagi mereka dalam memperdalam keyakinannya, serta mengamalkan ajaran agamanya tanpa diliputi rasa saling curiga atau prasangka yang merugikan (Zubaidi, 2007).

Dalam hubungan antaragama, kenyataan konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dihindarkan. Kehadiran konflik merupakan konsekuensi dari dinamika yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pertentangan semacam ini biasanya muncul ketika dua pihak atau lebih merasa terdapat perbedaan kepentingan yang tidak sejalan, keterbatasan sumber daya yang harus diperebutkan, atau adanya campur tangan dalam urusan tertentu sehingga menimbulkan kegagalan pada pihak lain (Duane Ruth-Heffelbower dalam Hasse Jubba, 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk ditelaah bagaimana bentuk interaksi antarumat beragama dapat dikelola agar tidak menimbulkan pertentangan, melainkan justru semakin memperkuat persaudaraan dan persatuan. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menganalisis penerapan konsep kerukunan umat beragama di tengah budaya Minangkabau yang kuat di Sumatera Barat, dengan fokus perhatian khusus pada kondisi sosial-keagamaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota (Ajidin, 2020).

Dalam konteks Indonesia, interaksi antaragama mulai tampak jelas sejak masa Orde Baru ketika pemerintah secara resmi mengakui lima agama. Kebijakan ini mendorong masyarakat yang sebelumnya tidak menganut agama tertentu untuk memeluk salah satu agama resmi guna menghindari tuduhan sebagai penganut ideologi komunis. Situasi tersebut kemudian memicu gerakan misi keagamaan, di mana masing-masing agama berusaha mengajak masyarakat untuk memeluk keyakinan mereka yang dianggap paling benar. Pada dekade 1960-an, misalnya, muncul ketegangan antara umat Islam dan Kristen yang dipicu oleh isu Kristenisasi yang berkembang di masyarakat (Riyanto, 2010).

Munculnya pandangan bahwa gereja memberikan perlindungan kepada anggota PKI, ditambah dengan bertambahnya jumlah penganut Kristen dan pembangunan gereja di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, memunculkan potensi ketegangan. Meskipun kedua hal tersebut berpotensi menjadi pemicu konflik, kenyataannya kondisi ini belum mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara umat Islam dan umat Kristiani, setidaknya hingga terjadinya peristiwa Meulaboh. Pada bulan Juni 1967, sebuah insiden terjadi di Meulaboh, Aceh Barat, serta di wilayah Sumatera Selatan, ketika sebuah gereja dibakar oleh warga Muslim setempat. Pendirian gereja tersebut diyakini mendapat dukungan dari beberapa pihak, termasuk kelompok masyarakat keturunan Tionghoa yang baru saja memeluk agama Kristen.

Amarah umat Muslim semakin memuncak karena gereja itu dibangun di tengah kawasan pemukiman Muslim, meskipun jumlah umat Kristiani di daerah tersebut sangat sedikit. Kemudian, pada 1 Oktober 1967, kerusuhan serupa kembali pecah di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana sekelompok pemuda Muslim melakukan perusakan terhadap sekitar 20 gereja serta sekolah-sekolah Katolik dan Protestan, bahkan membakar puluhan kitab Injil. Peristiwa ini dipandang sebagai reaksi terhadap pernyataan seorang guru Protestan bernama Mangunbahan yang dinilai telah menghina agama Islam beserta para pemeluknya.

Sesudah insiden Makassar, tepatnya pada 17 Oktober 1967, Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengirimkan sebuah surat terbuka kepada Pejabat Presiden Soeharto, berisi permintaan agar konflik tersebut segera dihentikan. Salah satu usulan KAMI adalah pembentukan lembaga konsultasi yang berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah toleransi antarumat beragama. Tidak hanya itu, Mar'ie Muhammad selaku ketua KAMI ketika itu juga mendesak pemerintah agar mengeluarkan regulasi terkait pengaturan pemberitaan media mengenai peristiwa konflik tersebut. Menanggapi hal ini, Soeharto kemudian mengeluarkan peringatan kepada seluruh pemeluk agama di Indonesia agar selalu waspada terhadap upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diduga berusaha menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Beberapa minggu setelah peristiwa tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyelenggarakan kongres keenam di Makassar. Presiden Soeharto menekankan bahwa forum ini dapat menjadi bukti bahwa situasi keamanan di Makassar telah kembali terkendali. Dalam agenda tersebut, ditekankan pentingnya komitmen umat Kristen untuk terus menjaga pelaksanaan ibadah dan praktik keagamaan secara damai di seluruh pelosok Indonesia. Kendati demikian, PGI tetap menegaskan sikapnya bahwa penyebaran Kitab Injil merupakan kewajiban yang harus dijalankan, meskipun mereka sadar harus siap menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.

Dalam rangka merespons permasalahan terkait penyebaran agama, Musyawarah Antaragama diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1967 atas inisiatif pemerintah. Forum ini dipimpin langsung oleh Menteri Agama K.H.M. Dachlan dan dihadiri sekitar 20 perwakilan dari kalangan Muslim, Protestan, serta Katolik. Dalam sambutannya, Presiden Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai langkah nyata untuk mengatasi ketegangan dan konflik bernuansa keagamaan yang marak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak satu pun kelompok keagamaan diperbolehkan mengajak pemeluk agama lain untuk berpindah keyakinan.

Meskipun demikian, forum tersebut gagal mencapai kata sepakat terkait persoalan dakwah yang ditujukan kepada pemeluk agama lain. Sejak saat itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mulai memberlakukan sejumlah regulasi tambahan terkait interaksi antarumat beragama. Pada tahun 1969, Menteri Agama bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan Surat Keputusan Bersama (No. 01/BER/MDN-MAG/1969) yang mengatur pelaksanaan tugas aparatur negara guna menjamin ketertiban serta kelancaran penyelenggaraan pengembangan dan praktik ibadah bagi pemeluk agama. Kebijakan ini berlandaskan pemahaman bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan setiap warga dalam memeluk serta mengamalkan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing.

Salah satu ketentuan penting dalam peraturan tersebut adalah kewajiban kepala daerah untuk mengawasi aktivitas penyebaran agama dan pelaksanaan ibadah oleh para penganutnya agar tidak menimbulkan konflik. Selain itu, setiap kegiatan keagamaan harus bebas dari unsur tekanan, suap, paksaan, maupun ancaman, serta tidak boleh mengganggu ketertiban umum. SKB tersebut juga menetapkan bahwa pendirian rumah ibadah, baik untuk agama apa pun, harus memperoleh izin resmi dari gubernur provinsi atau pejabat yang berwenang mengatur urusan tersebut.

Pola dialog sebagaimana digambarkan di atas didasarkan pada asumsi bahwa pemeliharaan hubungan antarumat beragama sepenuhnya menjadi tugas para tokoh agama, serta berfokus pada upaya mempertahankan jumlah pemeluk masing-masing agama. Pendekatan ini akhirnya menjadikan dialog sebatas komunikasi yang tidak efektif. Sunardi menegaskan bahwa kondisi tersebut muncul karena persoalan agama direduksi hanya sebatas isu penyebaran keyakinan, sementara konsep harmoni yang didorong oleh pemerintah dipersepsikan semata-mata sebagai ketiadaan konflik, bukan sebagai sebuah tanggung jawab kolektif (Banawiratma, dkk, 2010).

Isu-Isu Yang Berkembang

Awal mula konflik di Maluku dapat ditelusuri dari adanya aksi kekerasan yang ditujukan kepada para pendatang Muslim yang berasal dari Bugis, Buton, dan Makassar. Setelah terjadinya arus migrasi penduduk dalam jumlah besar, ketegangan tersebut meluas ke berbagai daerah di luar Maluku. Situasi ini semakin memburuk ketika beredar isu-isu yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan, misalnya adanya kabar mengenai serangan terhadap masjid maupun gereja. Konflik tersebut sempat mengalami penurunan eskalasi karena pelaksanaan Pemilu pada Mei 1999. Namun, pada Juli 1999, setelah hasil pemilihan di Ambon diumumkan dengan kemenangan PDIP, keadaan kembali memanas.

Kemenangan PDIP tersebut dipersepsikan sebagai kemenangan umat Kristen, sehingga memicu kekerasan baru. Akibatnya, masing-masing kelompok agama di Maluku terdorong untuk melakukan pertahanan diri sekaligus melancarkan tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang berbeda agama.

Puncak dari pertikaian tersebut terjadi pada 26 Desember 1999, ketika berlangsung pembantaian di Tobelo serta penyerangan terhadap Gereja Silo yang terletak di pusat Kota Ambon. Gereja tersebut merupakan salah satu gereja terbesar dari kalangan Protestan Maluku, namun pada hari yang sama, usai perayaan Natal, bangunan itu habis terbakar. Di sisi lain, tragedi serupa menimpa umat Muslim di sebuah masjid di Desa Tobelo, di mana hampir 800 orang menjadi korban pembantaian oleh kelompok umat Kristen. Rentetan peristiwa tragis ini memperuncing keterlibatan kedua pihak dalam lingkaran kekerasan, sehingga aparat keamanan sekalipun tidak mampu mengendalikan situasi yang semakin memanas.

Akhirnya, masyarakat Maluku mulai menyadari bahwa mereka telah letih terus-menerus berada dalam pertikaian. Kesadaran ini mendorong berbagai upaya untuk menghentikan konflik segera dilakukan. Sejumlah pihak yang berperan dalam proses perdamaian antara lain aparat keamanan, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah. Terdapat dua jalur utama yang ditempuh dalam usaha penyelesaian konflik di Maluku. Pertama, melalui pendekatan keamanan dan situasi darurat, dan kedua, melalui pendekatan pemulihan serta pembangunan kembali. Sayangnya, baik pemerintah maupun masyarakat sipil tidak memiliki strategi maupun perencanaan jangka panjang yang terstruktur dalam penanganannya. Pada tahap awal, penyelesaian konflik lebih banyak bergantung pada kekuatan militer yang didatangkan dari luar Maluku. Sementara itu, pemerintah pusat mulai menginisiasi perundingan damai antara komunitas Muslim dan Kristen pada Februari 2002.

Sebelum tercapainya perundingan damai pada Februari 2002, pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa langkah perdamaian, meskipun hasilnya tidak membuahkan keberhasilan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Gubernur Maluku dengan membentuk sebuah tim yang dikenal sebagai “Tim 6,” yang beranggotakan para tokoh agama dari masing-masing komunitas. Tugas utama mereka adalah menghentikan gelombang kekerasan di Ambon, melindungi simbol-simbol keagamaan seperti masjid dan gereja dari tindakan perusakan, serta mencegah penghancuran rumah-rumah penduduk. Tim ini pada mulanya dibentuk dengan tujuan memperkuat komitmen terhadap rekonsiliasi, namun ironisnya justru muncul dugaan bahwa beberapa anggotanya terlibat dalam aksi kekerasan.

Akibatnya, keberadaan “Tim 6” tidak mampu memberikan dampak nyata bagi proses perdamaian, dan upaya tersebut pada akhirnya mengalami kegagalan. Pada akhirnya, pemerintah pusat turun tangan secara langsung untuk memimpin jalannya proses perdamaian. Tepat pada tanggal 11 Februari 2002, di kawasan pegunungan Malino, Sulawesi Selatan, dilaksanakan penandatanganan kesepakatan damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Malino II. Dalam peristiwa penting tersebut, hadir dan terlibat dua tokoh nasional, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum serta Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Atas arahan Jusuf Kalla, Gubernur Maluku kemudian menunjuk sejumlah perwakilan dari kedua komunitas yang bertikai, yakni 35 orang dari pihak Muslim dan 34 orang dari pihak Kristen. Sebanyak 69 tokoh tersebut berkumpul di Malino selama tiga hari penuh, membicarakan jalan keluar dari konflik, hingga akhirnya menghasilkan penandatanganan Perjanjian Damai Malino II (kompasiana.com).

4. KESIMPULAN

Dialog antara individu yang memiliki keyakinan dan agama berbeda sesungguhnya telah berlangsung sejak pertemuan pertama mereka. Setiap kali agama baru hadir, ia selalu berhadapan dengan keyakinan atau agama yang sudah lebih dahulu ada. Interaksi tersebut membawa dialog ke berbagai tingkatan, termasuk pada ranah teologis yang lebih mendalam.

Dialog serta kerukunan antarumat beragama adalah dua proses komunikasi dan bentuk kerja sama yang saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini disebabkan karena salah satu unsur penting dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama adalah pelaksanaan dialog antaragama. Demi mewujudkan semangat dan tujuan terciptanya harmoni antarumat beragama, setiap penganut agama perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran agamanya sendiri agar dapat menafsirkan dan menghayati arti kerukunan secara teologis dan doktrinal.

Dialog dapat dipahami sebagai sarana perantara atau tujuan instrumental, bukan sebagai sasaran akhir. Ia dilaksanakan sebagai langkah untuk meraih tujuan yang lebih besar. Meskipun demikian, cita-cita hidup bersama tidak mungkin tercapai dengan baik tanpa keterlibatan dari seluruh pihak. Dalam perspektif holistik, keterlibatan aktif dan rasa memiliki terhadap keseluruhan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dialog seharusnya menjadi pola hidup bagi individu maupun komunitas yang beriman, sebagai suatu keharusan yang dijalankan jika mereka ingin tetap setia pada panggilan kemanusiaan sekaligus nilai ilahiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, Zilal Afwa. "Praktik Dialog Antar Umat Beragama (Studi pada Komunitas Islam-Kristen di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)." *Poros Onim*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2020).
- Banawiratma, J.B., Zainal Abidin Bagir, dkk. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010.
- Fatih, Moh Khoirul. "Dialog dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dalam Pemikiran A. Mukti Ali." *Religi*, Vol. 13, No. 1 (2017).
- Fatih, Moh Khoirul. *Dialog dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dalam Pemikiran A. Mukti Ali*. Yogyakarta: Religi Press, 2017.
- Hidayat, Komaruddin & Ahmad Gaus (eds.). *Passing Over: Melintas Batas Agama*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- "Mengingat Kembali Sejarah Singkat Konflik Ambon: Latar Belakang, Akar Permasalahan, dan Penyelesaian." *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/umi03508/61b9641c06310e49655b7192/mengingat-kembali-sejarah-singkat-konflik-ambon-latar-belakang-akar-permasalahan-dan-penyelesaian>
- Riyanto, E. Armada. *Dialog Interreligious: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Schumann, Olaf Herbert. *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian, dan Masa Depan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003.
- Zaprul Khan. "Dialog dan Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 2 (2018).
- Zubaidi. *Islam dan Benturan Antar Peradaban*. Yogyakarta: ARR-RUZZ Media, 2007.